



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG SETIANTO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI
3. NHK : 815977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.823.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/95 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 1.429 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 3.565.000.000
3. Tanah Seluas 1.374 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 687.000.000
4. Tanah Seluas 291 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 727.500.000
5. Tanah Seluas 595 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000
6. Tanah Seluas 859 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 859.000.000
7. Tanah Seluas 360 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
8. Tanah Seluas 112 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 415.000.000



1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 55.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 350.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. ---
D. SURAT BERHARGA	Rp. 828.792.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 410.169.462
F. HARTA LAINNYA	Rp. 399.173.817
Sub Total	Rp. 10.876.635.779
III. HUTANG	Rp. 378.619.152
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 10.498.016.627

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.